

ABSTRAK

Riskal Jabir, 2024. *“Tinjauan terhadap Pemekaran Daerah Wilayah di Tana Luwu Berdasarkan Perspektif Kedatuan Dan UU. No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah”* Tesis Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Firman Muhammad Arif.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pandangan dan aspirasi kedatuan Luwu terkait proses pemekaran wilayah yang berdampak pada identitas budaya dan sejarah wilayah tersebut. Mengevaluasi persepsi pemerintah daerah terkait UU Nomor 9 Tahun 2015 dan pelaksanaan pemekaran wilayah Tana Luwu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan penting seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan ahli terkait. Selain itu, data juga akan diperoleh melalui analisis dokumen dan observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pentingnya pemekaran daerah di Tana Luwu termasuk karena tingkat efisiensi administrasi dan pelayanan publik yang tidak maksimal, komitmen Presiden Soekarno terhadap Raja Luwu Andi Djemma untuk memberikan status sebagai daerah istimewa kepada Tana Luwu, serta pertimbangan ekonomi dan kesatuan politik. Pandangan Pemerintah Daerah terkait pemekaran wilayah Tana Luwu, sesuai dengan Undang-Undang RI No 9 Tahun 2015, menunjukkan bahwa dukungan untuk pembentukan Provinsi Luwu Raya telah lama diberikan. Namun, tantangan saat ini timbul karena adanya moratorium daerah otonomi baru dari Presiden. Sesuai dengan regulasi yang ada, pemekaran wilayah baru harus memenuhi persyaratan dari daerah, termasuk dukungan dari Kabupaten dan pembiayaan yang mencukupi. Oleh karena itu, para elit dan panitia pembentukan Provinsi Luwu Raya diharapkan untuk mempertimbangkan alternatif lain selain menunggu pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Evaluasi yang komprehensif dari berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan budaya, perlu dilakukan meskipun kompleks. Penting juga untuk mempertimbangkan pro dan kontra agar prosesnya dapat dipercepat. Pandangan Kedatuan Luwu terhadap pemekaran wilayah di Tana Luwu, sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, menekankan peran Kedatuan Luwu sebagai kontrol sosial terhadap Pemerintah dalam konteks NKRI. Ketika Indonesia merdeka, Kedatuan Luwu menyatakan dukungannya terhadap NKRI, tidak sebagai kerajaan tetapi sebagai kontrol sosial terhadap Pemerintah. Peran Kedatuan Luwu ditekankan dalam mendukung eksistensi hukum adat, yang diakui oleh negara untuk melestarikan adat di daerahnya masing-masing. Ada amanat dari leluhur terkait janji Presiden Soekarno kepada Raja Luwu Andi Djemma untuk memberikan wilayah khusus kepada Kerajaan Luwu seperti yang diberikan kepada Nangroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun saat ini belum direalisasikan. Tana Luwu memiliki letak geografis yang cukup luas sehingga menghadapi kesulitan ketika melakukan proses administratif di pusat Provinsi. Oleh karena itu, pembentukan Provinsi Luwu Raya dianggap perlu sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Tana Luwu, UU. No.9 Tahun 2015.